

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
KE BPK DAN BPKP PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH
12 – 14 MEI 2017**

I.	Dasar Pelaksanaan	:	1	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan-DIPA Nomor MA 002.01.001012.01.51.11.5799.001.001.052A.524111
			2	Kegiatan Belanja Perjalanan Biasa Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.
			3	Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Keahlian DPR RI No. BK/09447/SETJEN-DPR RI/PN/05/2017, Tanggal 3 Mei 2017. SPPD No. 14/ST/PKAKN/IV/2017 Tanggal 2 Juni 2017, An.
				<ul style="list-style-type: none"> • Helmizar • Sukmalalana • M. Aaqillmama • Teuku Surya Darma • Febri Kuntarto • M. Rizal Firmansyah • Syandi Negara • Nur Muhamad Ridwan • Eri Fareza
II.	Maksud Perjalanan Dinas	:	-	Menganalisis pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP Berbasis Akrual pada LKPD TA 2015 dan 2016, pengumpulan data serta informasi yang dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN.
III.	Dinas/Instansi yang dikunjungi	:	- -	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
IV.	Waktu Pelaksanaan	:	-	Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 12-14 Mei 2017
V.	Hasil			

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan yang dilakukan oleh Tim PKAKN ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah dalam rangka pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memeriksa penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD TA 2015. Dalam pertemuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Heri Subowo, selaku Kepala Perwakilan. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah pemeriksaan kinerja dilaksanakan pada Entitas 1 entitas Pemerintah Provinsi, 4 Pemerintah Kabupaten dan 3 Pemerintah Kota yakni Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten

Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pekalongan, Kota Purworejo, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, terkait dengan pelaksanaan SAP berbasis akrual pada LKPD untuk Pemda yang telah memperoleh opini WTP (21 entitas), WDP (15 entitas), Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Temuan signifikan terkait pelaksanaan SAP berbasis akrual pada LKPD, Terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang tidak jelas atau belum sepenuhnya mendukung SAP berbasis akrual sehingga belum dapat diimplementasikan, Pemda belum sepenuhnya menyusun tugas dan fungsi untuk setiap SDM pengelola keuangan, aset dan TI secara jelas, Pemda belum menyusun syarat jabatan pengelola keuangan, aset, dan TI serta Inspektorat selaku pereviu LKPD yang seragam dan berlaku untuk seluruh SKPD, Jumlah SDM pengelola keuangan, aset dan TI serta Inspektorat selaku pereviu LKPD belum sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan juga SDM pengelola keuangan, aset dan TI serta Pereviu LKPD belum sepenuhnya memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan, aset, dan TI. Serta dalam aspek pengelolaan teknologi informasi, Pemda belum melakukan analisis sistem aplikasi yang dibutuhkan dalam implementasi SAP berbasis akrual, sistem aplikasi yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan implementasi SAP berbasis akrual, serta sistem aplikasi yang dimiliki belum terintegrasikan secara horizontal (antar aplikasi dalam sistem).
- Masalah yang dihadapi terkait 3 *key area* pemeriksaan :
 - Kendala Komitmen, regulasi dan kebijakan, regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual dari pusat tidak sepenuhnya konsisten antar peraturan sehingga dalam penetapan peraturan turunannya, pemda masih perlu berkonsultasi.
 - Kendala SDM , pengelolaan SDM yang belum sepenuhnya memadai, berupa antara lain *maintaining data base* SDM, penyusunan syarat jabatan dan pola penempatan SDM di pemda belum sepenuhnya mendukung kompetensi untuk tugas dan fungsi yang dibutuhkan untuk penerapan SAP akrual.
 - Kendala pengelolaan TI, sistem aplikasi untuk implementasi SAP berbasis akrual masih dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akurat, belum terintegrasikan secara horizontal (antar aplikasi dalam sistem), dan belum didukung pengamanan yang memadai. Keterbatasan SDM IT yang juga memahami akuntansi, mengakibatkan pemda masih tergantung dari pihak luar, antara lain BPKP atau rekanan.
- Peran BPK dalam keberhasilan pelaksanaan SAP berbasis akrual, yaitu dengan cara mendorong komitmen kepala daerah dan legislatif serta pemerintah pusat untuk mendukung dalam implementasi SAP berbasis akrual, mendorong koordinasi antara pemerintah pusat (kemenkeu dan kemendagri), KSAP, akademisi dan pemda untuk implementasi SAP berbasis akrual pada pemda, melakukan evaluasi untuk meyakini bahwa kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah sudah sinkron dengan pengelolaan keuangan pusat dan kebijakan terkait lainnya sehingga mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP. Dalam proses audit kinerja, BPK memberikan fasilitas berupa diskusi-diskusi atas permasalahan dalam implementasi SAP berbasis akrual dan kemudian memberikan rekomendasi berkaitan dengan ketersediaan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual agar jelas, lengkap, dan konsisten. Dalam audit laporan keuangan, BPK mendeteksi kelemahan dalam pengendalian penyusunan laporan keuangan serta mendeteksi ketidakwajaran pelaporan akun-akun dalam laporan keuangan.
- Temuan yang signifikan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual pada Kota Magelang dan Kabupaten Batang adalah sebagai berikut;
 - *Restatement* telah dilakukan namun belum optimal

- Jumlah SDM pengelola keuangan, aset dan TI serta Inspektorat selaku pereviu LKPD belum sesuai dengan analisis kebutuhan
- SDM pengelola keuangan, aset, dan IT serta pereviu LKPD belum sepenuhnya memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan, aset, dan TI serta pereviu LKPD
- Sistem aplikasi yang dimiliki belum mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan yang dilakukan oleh Tim PKAKN ke BPKP Perwakilan Jawa Tengah adalah dalam rangka pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam menerapkan SAP berbasis akrual pada LKPD TA 2015 dan 2016. Dalam pertemuan tersebut, BPKP Perwakilan Jawa Tengah diwakili oleh Khaerun, selaku Kepala Bagian Tatausaha. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Terkait dalam keterbatasan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan LKPD berbasis akrual, terdapat tiga faktor keterbatasan, yang pertama keterbatasan SDM pengelola keuangan, kedua kurangnya dukungan Kepala Daerah dan Sekda, ketiga Cakupan wilayah yang luas dan jumlah OPD yang relatif banyak.
- Yang belum dioptimalkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten.kota terkait penyusunan LKPD berbasis akrual terdapat empat faktor, pertama Komitmen Kepala Daerah, kedua SDM Pengelola Keuangan, ketiga Regulasi dan Kebijakan, keempat Aset dan Teknologi Informasi.
- Bentuk pendampingan/pembinaan yang diberikan oleh BPKP terkait penerapan SAP berbasis akrual :
 - Bimbingan teknis/Narasumber
Penyusunan Perda tentang kebijakan Akuntansi berbasis akrual atau tentang sistem prosedur akuntansi berbasis akrual dan tentang Bagan Akun Standar (BAS), lalu tentang penerapan aplikasi SIMDA dan penyusunan LKPD
 - Asistensi/Pedampingan
Mereviu LKPD oleh Inspektorat, inventarisasi Aset Pemda, dan implementasi SAP berbasis akrual kepada DPPKD/Bakeuda dan OPD.

Demikian Laporan perjalanan dinas ini dibuat, sebagai bahan Laporan.